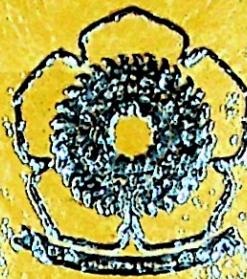


**PENGARUH PENGETAHUAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN
DI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

FITRIA WANDIRA

S1071002013

Ekonomi Pembangunan

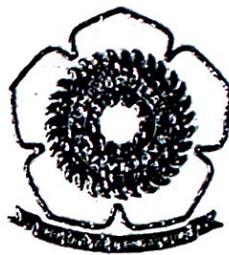
Diajukan Sebagai Satah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2014

**PENGARUH PENGETAHUAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN
DI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

FITRIA WANDIRA

51071002013

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Fitria Wandira

NIM : 51071002013

JURUSAN : Ekonomi Pembangunan

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan
Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di
Sumatera Selatan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 4 Juli 2014 dan telah
memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 15 Juli 2014

Ketua

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si

NIP: 196007101987031003

Anggota

Drs. Tatang A. Madjid S. M. A. Ph. D

NIP. 195206051985031003

Anggota

Anna Yulianita, S. E, M.Si

NIP. 197007162008012015

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, S.E.M.Si

NIP. 196805181993031003

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENGETAHUAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN
DI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :

Nama : Fitria Wandira
NIM : 51071002013
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian Konsentrasi : Keuangan Daerah

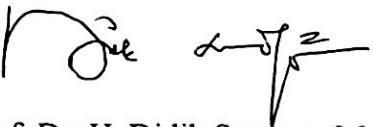
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

9 Juni 2014


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si

NIP. 196007101987031003

Anggota

9 Juni 2014


Drs. Tatang A. Madjid S., M. S., Ph. D
NIP. 195206051985031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawan ini:

Nama Mahasiswa : Fitria Wandira
NIM : 51071002013
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Sripsi yang berjudul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Selatan.

Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si
Anggota : Drs. Tatang A. Madjid S., M. A, Ph. D
Tanggal Ujian : 4 Juli 2014

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pertanyaan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, Juli 2014

Pembuat Pernyataan,



Fitria Wandira

NIM 51071002013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Selatan”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan di sumatera selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Didik Susetyo,M.Si dan Drs. Tatang A. Madjid S., M. A, Ph. D sebagai Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 2. Dr. Azwardi, SE, M.Si sebagai Ketua Jurusan.
 3. Drs. Nazeli Adnan, M. Si sebagai Sekretaris Jurusan.
 4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
 5. Orang Tua

Palembang, Mei 2012

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH PENGELOUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN

Oleh :

Fitria Wandira

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai indikator kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah perkembangan persentase pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan periode 2002 sampai 2012. Studi ini menunjukkan bahwa (a) pada umumnya, di tahun 2002 hingga 2012, pola persentase pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan diikuti oleh tidak hanya peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kemiskinan tetapi juga oleh penurunan persentase dari populasi penduduk miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama belanja pemerintah bidang pendidikan dan belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci : belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan, kemiskinan.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE IN HEALTH AND EDUCATION SECTORS ON THE POVERTY REDUCTION IN SOUTHERN SUMATERA

By:

**Fitria Wandira; Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.;Drs. Tatang A.Madjid,
M.A.,Ph.D.**

This study was aimed at describing the influence of government expenditure in health and education sectors on the poverty reduction in Southern Sumatera. The data were the percentage of government expenditure in health and education and the percentage of poor people in Southern Sumatera in 2002-2012. This study showed that (a) generally, in 2002 – 2012, there was a positive trend in the government expenditure in health and education sectors in Southern Sumatera. In other words, the increase in the government expenditure in health and education sectors did not only cause the increase in the government expenditure in education poverty, but also the decrease in the percentage of poor people in Southern Sumatera. This study also showed that the government expenditure in health and education had a positive and significant influence on the poverty reduction.

Keywords: **Government expenditure in education sector, government expenditure in health sector, poverty**

Acknowledged by,



Hariswan P.J.,M.Pd.

Email: hariswan@yahoo.com

Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	NAMA	: FITRIA WANDIRA
	NIM	: 51071002013
	Tempat / Tanggal Lahir	: PALEMBANG / 25 APRIL 1990
Alamat : PERUM. GRIYA ASRI BLOK D.85 RT/RW : 018/005 KEL. PULOKERTO KEC. GANDUS		
Telp / Hp : 087796883181/081540011041		
Jenis Kelamin : PERMPUAN		
Kewarganegaraan : INDONESIA		
Tinggi Badan : 165 cm		
Berat Badan : 45 kg		
Email : fitriawandira25@gmail.com		
PENDIDIKAN		
- SD NEGERI 170 PALEMBANG		
- SMP NEGERI 39 PALEMBANG		
- SMA NEGERI 2 PALEMBANG		
- UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG		

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Peneltian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori	
2.1.1. Definisi Kemiskinan	13
2.1.2. Konsep Kemiskinan	15
2.2.Teori Wagner	25
2.3.Teori Pengeluaran Pemerintah	26
2.4.Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan....	29
2.5.Hubungan Antara Pengeluaran Publik, Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.....	36
2.6.Penelitian Terdahulu	37
2.7.Kerangka Pemikiran	40
2.8.Hipotesis	42

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Ruang Lingkup	43
3.2.Rancangan Penelitian	43
3.3.Operasional Variabel Data	44
3.4.Objek dan Subjek Penelitian	44
3.5.Teknik Analisis	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Hasil Penelitian	
4.1.1. Perkembangan Penduduk Miskin.....	51
4.1.2. Kependudukan.....	52
4.1.3. Kondisi Perekonomian	52
4.2.Kondisi Sosial	
4.2.1. Pendidikan	55
4.2.2. Kesehatan	56
4.3.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia	57
4.4.Pembahasan	
4.4.1 Analisis Deskriptif	58
4.4.2 Analisis Regresi Berganda	59
4.4.3 Uji F	60
4.4.4 Uji t.....	61
4.4.5 Uji Asumsi Klasik	62
4.4.5.1 Uji Normalitas	62
4.4.5.2 Uji Heterokedestisitas	63
4.4.5.3 Uji Multikolinearitas	64
4.4.5.4 Uji Autokorelasi	64
4.4.5.5 Koefisien Determinasi.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.Kesimpulan	66
5.2.Saran	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran-lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Persentase Penduduk per Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2002-2012	2
Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan Per Kabupaten/Kota Tahun 2002-2012	3
Tabel 1.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2002-2012.....	4
Tabel 1.4.Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan	6
Tabel 1.5. Perkembangan Alokasi Anggaran untuk Sektor Kesehatan Dan Pendidikan	9
Tabel 4.1. Perkembangan Penduduk Miskin.....	51
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Laki-laki, Perempuan dan Rasio Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel 4.3. Hasil Analisis Deskriptif.....	58
Tabel 4.4. Anggaran Pendidikan dan Kesehatan	59
Tabel 4.5. Hasil Uji t	61
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin Watson	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan IPM di Sumatera Selatan	6
Gambar 1.2. Persentase Alokasi Anggaran untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	10
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	42
Gambar 3.1. Uji Signifikan t	47
Gambar 3.2. Uji Signifikan F	48
Gambar 4.1. Perkembangan Penduduk Miskin Sumatera Selatan	52
Gambar 4.2. Uji Normalitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Deskriptif	74
Lampiran 2 Hasil Regresi	74
Lampiran 3 Uji Normalitas	74
Lampiran 4 Uji Heterokedastisitas.....	75
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas.....	75

BAB I

Pendahuluan



1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui potensi sumber daya dan standar pelayanan yang dibutuhkan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Adanya peningkatan dana desentralisasi melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta penggalian potensi sumber daya daerah setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Adi, 2009 : 23).

Alokasi belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya indeks pembangunan manusia (IPM). Apabila IPM mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi

semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ini, secara umum dapat dikatakan sangat membanggakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir ini sangatlah tinggi, walaupun mengalami penurunan di masa krisis. Tetapi tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan diantaranya kemiskinan dan rendahnya pembangunan manusia.

**Table 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Per Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan Tahun 2002-2012**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ogan Komering Ulu	17,89	18,16	17,59	46,1	15,69	14,64	13,17	12,28	11,58	11,19	
Ogan Komering Ilir	22,43	22,02	24,47	17,41	22,50	17,67	16,17	15,98	15,06	14,53	
Muara Enim	24,18	22,34	22,03	14,07	19,87	17,98	15,96	14,51	13,71	13,21	
Lahat	30,08	29,61	29,57	16,31	28,09	23,21	20,98	19,02	17,92	17,45	
Musi Rawas	35,85	35,40	34,82	16,69	32,93	24,27	21,40	19,38	18,25	17,67	
Musi Banyuasin	37,20	36,39	36,28	17,18	33,60	25,45	22,76	20,06	18,99	18,29	
Banyuasin	22,80	20,86	20,22	14,99	17,72	15,38	13,72	12,39	11,66	11,27	
OKU Selatan	-	-	-	58,8	67,8	18,96	14,56	12,73	11,53	10,84	10,49
OKU Timur	-	-	-	18,38	10,31	16,03	12,12	9,95	9,81	9,23	8,98
Ogan Ilir	-	-	-	23,75	82,7	21,57	17,78	15,65	13,97	13,18	12,79
Empat Lawang	-	-	-	-	-	23,50	18,37	15,80	14,73	13,82	13,36
Palembang	9,75	9,57	9,35	12,63	8,98	16,66	14,75	15,00	14,13	13,59	
Prabumulih	13,29	12,41	11,83	12,3	5,57	15,39	13,93	12,93	12,19	11,71	
Pagar Alam	16,26	14,91	13,20	13,7	9,75	10,23	9,66	9,81	9,24	9,00	
Lubuk Linggau	17,80	16,42	16,11	28,5	14,25	17,36	15,12	15,30	14,43	13,95	
Sumatera Selatan	22,49	21,54	20,92	21,01	24,71	19,15	17,67	15,68	14,80	14,83	13,48

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 2002-2012.

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 selama periode 2002 – 2012, menunjukkan bahwa persentase penurunan penduduk miskin di Sumatera Selatan sangat fluktuatif, kita dapat melihat adanya penurunan selama periode 2002 - 2004, yaitu masing-masing secara berurutan mencapai 22,49 persen, 21,54 persen, 20,92 persen. Pada tahun 2005 - 2006 yang sempat mengalami peningkatan kembali

sebesar 21,01 persen dan 24,71 persen. Namun di tahun 2007 – 2010 persentase penduduk menunjukkan penurunan kembali yang sangat signifikan yaitu 19,15 persen, 17,67 persen, 15,68 persen, 14,80 persen. Dan mengalami sedikit peningkatan kembali di tahun 2011 yaitu meningkat sebesar 0,03 persen, dan pada tahun 2012 pemerintah dapat menekan angka persentase penduduk miskin di angka 13,48 persen. Secara khusus, penurunan ini juga tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin di 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada periode yang sama. (Data dan Informasi Kemiskinan BPS, 2009)

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Selatan Per
Kabupaten/Kota Tahun 2002-2012 (000 jiwa)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01. Ogan Komering Ulu	195,7	201,4	45,2	46,1	40,6	38,6	35,1	39,9	38,3		
02. Ogan Komering Ilir	220,0	218,9	161,6	174,1	152,7	122,7	114,2	116,5	111,9		
03. Muara Enim	147,0	138,3	140,3	140,7	128,5	118,4	106,4	104,5	100,4		
04. Lahat	159,1	16,2	162,6	163,1	94,9	78,7	71,3	70,5	67,7		
05. Musi Rawas	165,1	164,0	166,4	166,9	160,3	120,7	108	102,0	98,0		
06. Musi Banyuasin	164,4	164,4	171,3	171,8	165,6	129,5	118,9	113,4	108,9		
07. Banyuasin	156,4	147,3	149,5	149,9	136,8	122,4	112,1	93,0	89,3		
08. OKU Selatan	-	-	-	58,8	67,8	61,2	47,7	42,1	36,7	35,2	
09. OKU Timur	-	-	-	102,8	103,1	90,7	69,6	57,7	59,9	57,6	
10. Ogan Ilir	-	-	-	85,5	82,7	79,6	67,1	60,1	53,4	51,3	
11. Empat Lawang	-	-	-	-	-	49,7	39,1	33,7	32,6	31,3	
12. Palembang	125,2	124,1	125,9	126,3	124,4	235,3	211,8	218,6	210,0		
13. Prabumulih	16,5	15,8	15,5	12,3	10,0	20,9	19,1	21,0	20,2		
14. Pagar Alam	18,1	16,9	15,2	13,7	11,2	11,8	11,2	12,4	11,9		
15. Lubuk Linggau	29,6	28,0	28,4	28,5	25,6	31,8	28,1	30,9	29,7		
Sumatera Selatan	1.434,10	1.397,10	1.379,30	1.429,00	1.446,90	1.331,80	1.249,61	1.167,87	1.125,73	1.074,81	1.057,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 bahwa pada tahun 2011 terdapat 4 Kabupaten/Kota yang jumlah penduduk miskinnya di atas 100 ribu jiwa, yaitu

Tabel 1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2012

Provinsi	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
11. Aceh	66,0	68,7	69,05	69,41	70,35	70,76	71,31	71,7	72,16	72,51
12. Sumatera Utara	68,8	71,4	72,03	72,46	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65	75,13
13. Sumatera Barat	67,5	70,5	71,19	71,65	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28	74,7
14. Riau	69,1	72,2	73,63	73,81	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53	76,9
15. Jambi	67,1	70,1	70,95	71,29	71,46	71,99	72,45	72,74	73,3	73,78
16. Sumatera Selatan	66,0	69,6	70,23	71,09	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99
17. Bengkulu	66,2	69,9	71,09	71,28	71,57	72,14	72,55	72,92	73,4	73,93
18. Lampung	65,8	68,4	68,85	69,38	69,78	70,3	70,93	71,42	71,94	72,45
19. Kep. Bangka Belitung	65,4	69,6	70,68	71,18	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37	73,78
20. Kepulauan Riau	-	70,8	72,23	72,79	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78	76,2
31. DKI Jakarta	75,6	75,8	76,07	76,33	76,59	77,03	77,36	77,6	77,97	78,33
32. Jawa Barat	65,8	69,1	69,93	70,32	70,71	71,12	71,64	72,29	72,73	73,11
33. Jawa Tengah	66,3	68,9	69,78	70,25	70,92	71,6	72,1	72,49	72,94	73,36
34. Yogyakarta	70,8	72,9	73,5	73,7	74,15	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75
35. Jawa Timur	64,1	66,8	68,42	69,18	69,78	70,38	71,06	71,62	72,18	72,83
36. Banten	66,6	67,9	68,8	69,11	69,29	69,7	70,06	70,48	70,95	71,49
51. Bali	67,5	69,1	69,78	70,07	70,53	70,98	71,52	72,28	72,84	73,49
52. Nusa Tenggara Barat	57,8	60,6	62,42	63,04	63,71	64,12	64,66	65,2	66,23	66,89
53. Nusa Tenggara Timur	60,3	62,7	63,59	64,83	65,36	66,15	66,6	67,26	67,75	68,28
61. Kalimantan Barat	62,9	65,4	66,2	67,08	67,53	68,17	68,79	69,15	69,66	70,31
62. Kalimantan Tengah	69,1	71,7	73,22	73,4	73,49	73,88	74,36	74,64	75,06	75,46
63. Kalimantan Selatan	64,3	66,7	67,44	67,75	68,01	68,72	69,3	69,92	70,44	71,08
64. Kalimantan Timur	70,0	72,2	72,94	73,26	73,77	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71
71. Sulawesi Utara	71,3	73,4	74,21	74,37	74,68	75,16	75,68	76,09	76,54	76,95
72. Sulawesi Tengah	64,4	67,3	68,47	68,85	69,34	70,09	70,7	71,14	71,62	72,14
73. Sulawesi Selatan	65,3	67,8	68,06	68,81	69,62	70,22	70,94	71,62	72,14	72,7
74. Sulawesi Tenggara	64,1	66,7	67,52	67,8	68,32	69,00	69,52	70,00	70,55	71,05
75. Gorontalo	64,1	65,4	67,46	68,01	68,83	69,29	69,79	70,28	70,82	71,31
76. Sulawesi Barat	-	64,4	65,72	67,06	67,72	68,55	69,18	69,64	70,11	70,73
81. Maluku	66,5	69,0	69,24	69,69	69,96	70,38	70,96	71,42	71,87	72,42
82. Maluku Utara	65,8	66,4	66,95	67,51	67,82	68,18	68,63	69,03	69,47	69,98
91. Papua Barat	-	63,7	64,83	66,08	67,28	67,95	68,58	69,15	69,65	70,22
94. Papua	60,1	60,9	62,08	62,75	63,41	64,00	64,53	64,94	65,36	65,86
Indonesia (BPS)	65,8	68,7	69,57	70,1	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29

Catatan: Mulai tahun 2005, angka IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam dua digit atau dua desimal dibelakang koma

Sumber : www.bps.go.id

Kabupaten/Kota Ogan Komering Ilir dengan jumlah penduduk miskin 111,9 ribu jiwa. Kabupaten/Kota Muara Enim dengan jumlah penduduk miskin yaitu

sebanyak 100,4 ribu jiwa, Kabupaten/Kota Banyuasin dengan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 108,9 ribu jiwa, Kabupaten/Kota Palembang dengan jumlah penduduk miskin terbanyak 210,0 ribu jiwa. Sedangkan untuk data Provinsi Sumatera Selatan sendiri pada tahun 2012 menunjukkan penurunan yang paling signifikan adalah tahun jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 1.057,03 ribu jiwa.

Walaupun dihadapkan pada angka kemiskinan yang cukup tinggi, namun Sumatera Selatan memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cukup tinggi tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Sumatera Selatan dalam empat tahun berturut – turut menempati peringkat ke – 10 jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purchasing power parity index* (PPP). (dalam Azwini, Karomo dan Prijono, 1988 : 469).

Tabel 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera**Selatan Tahun 2002-2012**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	<u>IPM</u>										
	<u>HDI</u>										
	2002 (1)	2003 (2)	2004 (3)	2005 (4)	2006 (5)	2007 (6)	2008 (7)	2009 (8)	2010 (9)	2011 (10)	2012 (11)
Ogan Komering Ulu	66,6		69,3	69,9	72,36	71,40	71,92	72,36	73,14	73,41	74,01
Ogan Komering Ilir	63,1		68,1	68,8	70,06	69,15	69,64	70,06	70,61	70,95	71,45
Muara Enim	64,0		68,1	68,7	70,38	69,42	69,91	70,38	70,81	71,31	71,65
Lahat	65,1		67,2	67,6	70,53	69,35	69,99	70,53	71,30	71,67	72,29
Musi Rawas	62,0		64,4	65,0	67,33	66,31	66,77	67,33	67,89	68,20	69,01
Musi Banyuasin	64,6		68,1	68,7	71,13	69,64	70,54	71,13	71,81	72,40	73,15
Banyuasin	-		66,7	67,2	69,45	68,60	69,08	69,45	69,78	70,14	70,70
OKU Selatan	-		67,9	68,8	71,02	70,28	70,66	71,02	71,42	71,68	72,29
OKU Timur	-		65,1	65,4	69,39	68,14	68,88	69,39	69,68	70,24	70,72
Ogan Ilir	-		65,6	66,0	69,71	68,17	68,67	69,17	69,51	69,91	70,52
Empat Lawang	-		-	66,59	68,15	67,17	67,68	68,15	68,61	68,92	69,69
Palembang	71,2		73,1	73,6	75,83	74,94	75,49	75,83	76,23	76,63	77,38
Prabumulih	-		70,7	71,1	73,69	72,51	73,20	73,69	74,27	74,81	75,45
Pagar Alam	-		69,5	69,9	72,48	71,70	72,16	72,48	73,19	73,51	74,15
Lubuk Linggau	-		65,8	66,63	70,18	69,24	69,69	70,18	70,56	71,00	71,46
Sumatera Selatan	66,0	66,0	68,7	69,6	71,09	71,40	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99

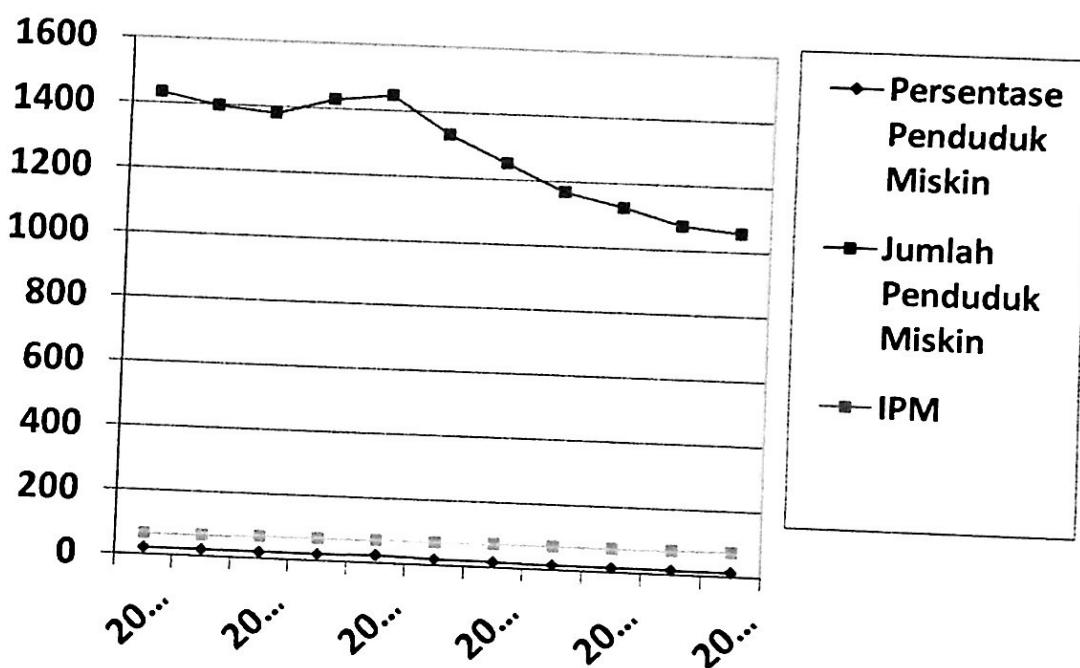
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Peningkatannya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan, 2003-2012, BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indeks pembangunan manusia selama kurun waktu 11 tahun yaitu dari tahun 2002-2012 tersebut terlihat terjadinya peningkatan di setiap tahunnya dari 66,0-73,99.

Demikian juga dengan kondisi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota, di mana pencapaian IPM di Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu pada tahun 2012 sebesar 74,01 dan Kabupaten/Kota OKU menduduki peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Secara umum, capaian IPM hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (BPS, 2009). Hal tersebut

dapat dilihat pada setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang diikuti pula oleh persentase penduduk miskin, tapi tidak untuk IPM yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan IPM di Sumatera Selatan

Dari gambar 1.1, dapat dilihat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan terjadi setelah tahun 2006 hingga 2012. Dimana angka penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.446,90, 1.331,80, 1.331,80, 1.249,61, 1.167,87, 1.125,73, 1.074,81 dan 1.057,03. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah berhasil dilaksanakan.

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran

praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Dengan demikian sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh antara lain Gomanee (2003), Brata (2005) dan Chemingui (2007). (widodo, 2011 : 27)

Tabel 1.5 Perkembangan Alokasi Anggaran untuk Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Sumatera Selatan Tahun 2002-2013

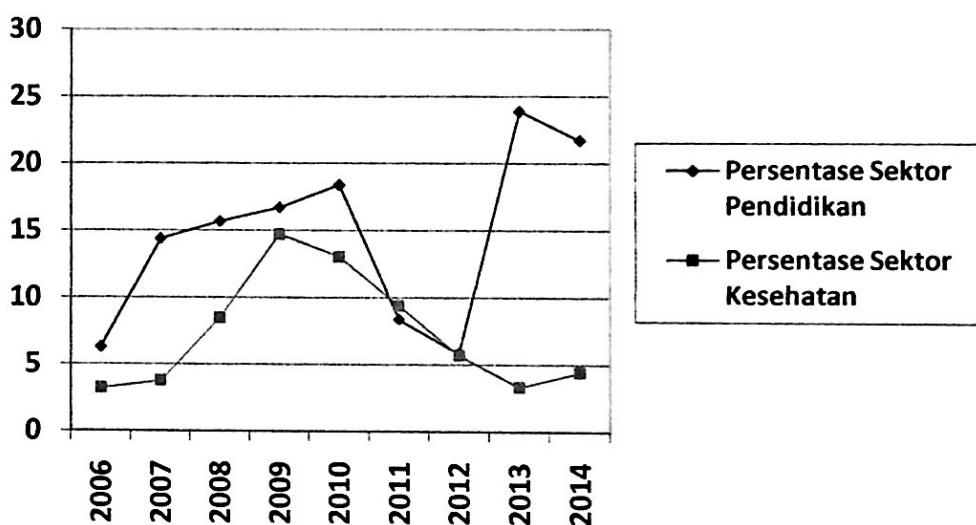
No	Tahun	Pendidikan		Kesehatan	
		Besaran (Rp)	Persen (%)	Besaran (Rp)	Persen (%)
1	2002	27.214.660.000	3,58	13.008.990.000	1,71
2	2003	66.453.680.000	7,65	20.932.910.000	2,41
3	2004	52.131.230.802	4,98	86.200.249.912	8,22
4	2005	33.252.012.671	29,36	80.819.594.555	71,37
5	2006	99.259.111.751	6,28	50.928.158.559	3,22
6	2007	330.889.000.000	14,37	86.709.000.000	3,77
7	2008	244.562.670.696	15,69	132.007.435.674	8,47
8	2009	460.668.748.168	16,72	405.898.100.785	14,73
9	2010	593.359.468.067	18,4	420.048.822.739	13,02
10	2011	383.000.000.000	8,36	335.210.439.000	9,40
11	2012	276.066.331.000	5,82	270.122.788.000	5,7
12	2013	1.377.671.291.000	23,9	179.075.092.000	3,35

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam kurun waktu 2002 dan 2012, berdasarkan Tabel 1.4 data dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Alokasi Anggaran Dana Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, terlihat bahwa kecenderungan yang meningkat. Demikian pula dengan pengeluaran sektor publik bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan yang juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Realisasi pengeluaran publik bidang pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 sebesar Rp 276.066.331.000 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 Rp 99.259.111.751. Namun jika perbandingan dilihat pada tahun 2010, di tahun 2012 mengalami penurunan anggka besaran alokasi anggaran di sektor pendidikan dari Rp. 593.359.468.067 pada tahun 2010 menurun jadi Rp. 276.066.331.000.

Begini juga yang ditunjukkan pada persentase pengeluaran bidang

pendidikan terhadap jumlah belanja (Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga) pada tahun 2010 yang sebesar 18,40 persen justru menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 5,82 persen. Demikian juga dengan realisasi pengeluaran bidang kesehatan yang meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 420.048.822.739 jika dibandingkan dengan tahun 2006. Persentase pengeluaran bidang kesehatan terhadap jumlah belanja juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2006 sebesar 3,22 persen dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 13,02 persen.



Gambar 1.2 Persentase Alokasi Anggaran untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Kenyataan terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan adanya komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pengeluaran pemerintah tersebut belum tentu menyentuh langsung kepada masyarakat miskin.

Dari latar belakang maka penulis memberi judul pada skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Selatan”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk “mendeskripsikan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Memberikan informasi bagi pihak manapun yang ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2001. *Ekonomi Pembangunan*. UII Press. Yogyakarta.
- Agusalim. 2007. Peran Anggaran Pemerintah Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10 No. 1.
- Andaiyani. 2012. *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Yogyakarta : BP-STIE-TKPN.
- BAPPEDA. 2009. *Data Alokasi Anggaran untuk Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2002-2012*.
- BPS. *Sumatera Selatan Dalam Angka*
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Februari
- Chemingui, Mohamed Abdelbasset. 2007. *Public Spending and Poverty Reduction in an Oil based Economy: The Case of Yemen*. Revised.
- Fukuda-Parr, Sakiko. 2004. *Journal of International Development: The Millennium Development Goals: the pledge of world leaders to end Poverty Will Not Be Met With Business as Usual*. ProQuest Research Library
- Gomanee, Karuna. 2003. *Aid, Public Spending and Human Welfare: Evidence From Quantile Regressions, Paper for a Session on 'Poverty and Human Development'*. Organised by Dr Noorbakhsh at the DSA Annual Conference. Glasgow. 10-12 September
- Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Gujarati. 1991. *Ekonometrika Dasar, Terjemahan oleh Sumarno Zain*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Imam Ghozali. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Insukindro, R. Maryatmo, Aliman, Sri Yani Kusumastuti, A. Ika Rahutami. 2004. *Modul Ekonometrika Dasar*. Kerjasama BI dan FE UGM. Yogyakarta.

- Issafitri, Armeicha. 2008. *Analisis Kemiskinan di Pagar Alam (Studi kasus kecamatan Pagar Alam Selatan)*. Skripsi Program Strata 1 Universitas Sriwijaya, Palembang (tidak Dipublikasi).
- Jhingan, ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lincoln Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Meyer, Michael Glenn. 2009. *Human Development and The Use Of Health Education Media Among Adult Type 2 Diabetics In Rural Appalachia*. ProQuest Research Library
- Moeliono, et. Al. 2007. *Menuju Kesejahteraan* : Pemantauan kemiskinan di Maliau, Indonesia. Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Musgrave, Richard. A dan Peggy B Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practise*. Fifth Edition, McGraw-Hill Book, International Edition, 1989.
- Novianto Dwi Wibowo. 2003. Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Hipotesis Kuznet. *Buletin Pangsa*. Edisi 10/IX.
- Nurmayanti, Dian A. 2013. *Teori-teori kemiskinan*. Diposting pada 23 Oktober 2013. [Http://dianggraini06.blogspot.com/2013/10/teori-teori-kemiskinan.html](http://dianggraini06.blogspot.com/2013/10/teori-teori-kemiskinan.html)
- Priyo Hari Adi, Fhino Andrea Christy. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Prakoso, (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah*. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2011
- Sadono Sukirno. 2000. *Makroekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Schimmel, Joërg. 2009. *Development as Happiness: The Subjective Perception of Happiness and UNDP's Analysis of Poverty, Wealth and Development*. ProQuest Research Library
- Setiawan, Mohammad Bhakti , Abdul Hakim. 2013. *Jurnal Economia: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA*. ProQuest Research Library
- Siregar, Hermanto. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". Diambil pada tanggal 16 Oktober 2013. [Http://www.google.com](http://www.google.com)
- Stigliz, E. Joseph. 1986. *Economic of Public Sector*. New York: WW Norton and Company
- Sutomo, Rudi. 2006. *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang (tidak Dipublikasi).
- Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Pustaka Pelajar. Cetakan ke IV. Yogyakarta.
- Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga.
- UNDP. 1990. *Human Development Report*
- UNDP. 1997. *Human Development Report*
- UNDP. 2005. *Human Development Indicator*
- Williamson, Deanna L. 2001. *Canadian Journal of Public Health: The role of the health sector in addressing poverty*. ProQuest Research Library
- Widarti. 2001. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI)*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang (tidak dipublikasi).
- Widodo, Adi., Waridin , Johanna Maria K. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol.1. Universitas Diponogoro, Semarang.

- World Bank. 2007. *Ikhtisar Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan peluang Baru: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia*. Februari.
- Zuluaga. 1990. *Different Channels of Impact of Education on Poverty: An Analysis for Colombia*. Preliminary Draft.